

KETERLIBATAN INGGRIS DALAM PERANG SURIAH

Oleh :

Marlisa Putri Utami

Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

marlisa.putri.2015@fisipol.umy.ac.id

ABSTRAK : Perang Suriah telah menimbulkan kehancuran dan kesengsaraan khususnya bagi penduduk sipil Suriah sebagai pihak yang terdampak secara langsung. Selama perang yang masih berlangsung sejak tahun 2011 tersebut, hampir 500.000 penduduk sipil Suriah telah tewas dimana ribuan orang diantaranya tewas akibat serangan senjata kimia yang digunakan oleh rezim Bashar al-Assad sejak tahun 2012. Banyak pihak yang terlibat dalam Perang Suriah termasuk Inggris. Inggris sebagai negara yang sejak perang Suriah telah terlibat namun dalam bentuk bantuan kemanusiaan kemudian memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri yang baru berupa kebijakan untuk menyerang persediaan senjata kimia Suriah. Maka untuk melihat alasan Inggris melibatkan diri secara militer dalam perang Suriah tersebut, penulis menggunakan Mazhab Inggris (*English School*) ‘Masyarakat Internasional’, Kepentingan Nasional, dan Pengambilan Keputusan Luar Negeri sebagai alat analisis dalam penelitian skripsi ini.

Adapun hasil dari penelitian ini mengapa Inggris melibatkan diri secara militer dalam perang Suriah adalah untuk mendeteren kapabilitas senjata kimia Suriah dengan justifikasi doktrin untuk melindungi (*Responsibility to Protect/R2P*) keamanan nasional negaranya, dunia internasional dan untuk mencegah digunakannya kembali senjata kimia Suriah di kemudian hari.

Kata Kunci : Inggris, Perang Suriah, Kebijakan Luar Negeri, Kepentingan Nasional.

ABSTRACT

Syrian War has caused destruction and misery specially for the Syrian people who became the party who got affected directly. During the war that is still on going since 2011,

almost 500.000 people have been killed where thousands amongst it were victims of the use of chemical weapons by the regime of Bashar al-Assad since 2012. Many party has been involved in Syrian War including the United Kingdom. As a nation, The United Kingdom have already involved in Syrian War but only in terms of humanitarian assistance. The United Kingdom then decided to release a new foreign policy to do a military attack on Syria's chemical weapon stockpile. In order to see the reason why the United Kingdom is involving itself militarily in the Syrian War, the writer use English School 'International Community', National Interest, and Foreign Decision Making process as instruments of analysis in this research.

Any results from this research of why did the United Kingdom involving itself militarily in Syrian War is that the United Kingdom wanted to deterrent the capability of Syria's chemical weapons with the justification of the doctrin to protect (Responsibility to Protect/R2P) its national security, global world, and to avoid the use of chemical weapons in the future.

Keywords : The United Kingdom, Syrian War, Foreign Policy, National Interest.

PENDAHULUAN

Seorang pemuda di Tunisia bernama Mohamed Bouazizi, berumur 26 tahun membakar dirinya didepan gedung pemerintah pada tahun 2011 sebagai bentuk protes kepada pemerintahan dinegaranya. Aksi ini dilatar belakangi oleh dirinya yang kesal lantaran tidak diperbolehkan berjualan buah-buahan oleh pemerintah beberapa hari sebelum protesnya dilakukan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi awal dari protes-protes lainnya yang terjadi di beberapa negara di kawasan Timur Tengah seperti Mesir, Yaman, hingga Suriah yang mayoritasnya dilakukan karena ketidakpuasan masyarakat di negara-negara tersebut akan sistem pemerintahan autokrasi yang sudah bertahun-tahun berjalan (Staff, 2011). .

Rangkaian peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan istilah *Arab Spring*. Suriah sebagai salah satu negara yang terinspirasi oleh hal tersebut, melakukan sebuah protes damai yang ditujukan untuk pemerintah pada tahun 2011. Namun protes damai ini dijawab oleh

pemerintah dibawah komando Presiden Bashar al-Assad dengan menembaki ratusan pengunjukrasa serta menahan ratusan lainnya. Presiden Assad lalu menjadi semakin tidak terkendali dengan memberikan komando untuk membunuh semua yang melawan pemerintahan dan dirinya. Sejak peristiwa tersebut, konflik berubah menjadi perang saudara (Aljazeera, 2018).

Aktor-aktor yang terlibat terbagi ke dalam beberapa kelompok di antaranya adalah kelompok yang berafiliasi dengan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad dan yang berafiliasi dengan kelompok oposisi. Di antara aktor-aktor tersebut, Inggris sebagai aktor eksternal dalam proses perjalanan konflik Suriah secara terbuka memberikan dukungannya kepada kelompok oposisi. (Waring, 2018).

Sebelumnya, Inggris telah mengambil tindakan untuk menutup pengoperasian kedutaan besarnya di Damaskus serta memulangkan semua personil diplomatik dari Suriah. Inggris bahkan terlibat dalam pemberian bantuan berupa dana sebesar 2.7 milyar poundsterling kepada Suriah dan sebagain besar negara-negara yang berkonflik di Kawasan Timur Tengah (Office F. C., 2018).

Keterlibatan Inggris dalam perang Suriah kemudian berkembang menjadi intervensi secara militer berupa dilancarkannya serangan udara terhadap basis senjata kimia Suriah bersama dengan sekutunya yaitu Amerika Serikat dan Prancis pada bulan April 2018. Aksi tersebut dilatar belakangi oleh ditemukannya fakta mengenai penggunaan senjata kimia dalam perang Suriah sejak Desember 2012 di kota Homs yang terletak di sebelah barat Suriah dan beberapa kota besar serta desa-desa di Suriah hingga akhir tahun 2018 (Blix, 2018).

Penggunaan senjata kimia dalam bentuk dan kondisi apapun jelas dilarang dibawah hukum internasional dan merupakan sebuah bentuk pelanggaran dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada tahun 1925, disahkan sebuah peraturan yang dikenal sebagai Protokol

Jenewa yang mengatur tentang pelarangan penggunaan senjata biologi kimia dalam perang (Pujimori, 2015).

Pihak Suriah sendiri secara resmi telah mengumumkan kepemilikan atas persediaan senjata kimia pada tahun 2012. Menurut *Human Rights Watch*, sejak tahun 2013 hingga awal 2018, di Suriah telah dilancarkan serangan menggunakan senjata kimia sebanyak lebih dari 85 kali yang dilakukan di berbagai daerah seperti Damascus, Homs, Idlib, hingga Aleppo yang telah menewaskan lebih dari 1400 penduduk sipil (Blinx, 2018).

KERANGKA PEMIKIRAN

Untuk menganalisa serta memperjelas uraian mengenai mengapa Inggris melibatkan diri secara militer dalam Perang Suriah, penulis menggunakan kerangka pemikiran Mazhab Inggris (*English School*), konsep Kepentingan Nasional dan konsep Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri.

1. Mazhab Inggris (*English School*) “Masyarakat Internasional”

Menurut Hedley Bull, pendekatan Masyarakat Internasional klasik pada dasarnya memandang hubungan internasional sebagai aktivitas manusia yang menyangkut nilai-nilai fundamental internasional yaitu ketertiban dan keadilan internasional. Menurut mereka, individu merupakan entitas penting masyarakat internasional dimana hak asasi manusia didahulukan melebihi hak negara yang berdaulat (dalam hal ini hak suatu negara untuk diintervensi oleh negara lain). Berdasarkan pandangan ini, paling tidak terdapat hak dan kewajiban bagi suatu negara untuk mengintervensi negara lain jika dianggap perlu untuk mengurangi terjadinya hal-hal ekstrem yang mengancam keamanan manusia di negara tersebut (Jackson & Sorensen, 2013).

Dalam tatanan masyarakat internasional, keadaan sosial didalamnya adalah apa yang disebut oleh Hedley Bull dengan frasa ‘masyarakat anarki’ yang bermakna tatanan sosial negara-negara merdeka diseluruh dunia. Poin utama masyarakat anarki adalah peningkatan serta pemeliharaan ketertiban dan keadilan internasional dimana yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut dimiliki oleh negara-negara besar dan kuat. Negarawan serta negara-negara yang besar dan kuat memiliki kewajiban luar negeri yang berasal dari keanggotaannya dalam masyarakat internasional yang ditentukan oleh hukum internasional (Jackson & Sorensen, 2013).

Pada pelaksanaannya, poin utama masyarakat anarki juga berkembang menjadi tanggung jawab untuk melindungi atau yang disebut dengan *Responsibility to Protect* (R2P) terhadap nilai-nilai fundamental internasional. Dimana ketika manusia di suatu negara menderita bahaya serius sebagai akibat dari konflik, perang, pemberontakan, penindasan serta kegagalan negara, maka negara-negara yang besar dan kuat atau negarawan dapat mengintervensi dengan tujuan dan tanggung jawab internasional untuk melindungi (Jackson & Sorensen, 2013).

Inggris sebagai aktor internasional tidak terlepas dari bagiannya dalam tatanan masyarakat internasional. Pada pendekatan masyarakat internasional, poin utamanya adalah peningkatan dan pemeliharaan ketertiban serta keadilan internasional atas ancaman terhadap hak asasi manusia yang diakibatkan oleh perang sipil, negara yang gagal, *ethnic cleansing*, dan tentu saja terorisme. Tanggung jawab atas nilai-nilai fundamental internasional tersebut, menjadi milik negara-negara berkekuatan besar termasuk Inggris. Ketika peperangan di Suriah telah dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran, kejahatan dan kekerasan terhadap

kemanusiaan yang terjadi secara besar-besaran yang diakibatkan oleh penggunaan senjata kimia, Inggris sebagai negara yang besar dan kuat bertindak dan terlibat ke dalam perang tersebut dengan justifikasi doktrin yang disebut tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia serta keamanan penduduk Suriah (*Responsibility to Protect/R2P*) (Jackson & Sorensen, 2013). Doktrin R2P ini kemudian mempengaruhi kepentingan nasional serta pilihan kebijakan luar negeri Inggris untuk mengintervensi perang di Suriah.

2. Kepentingan Nasional

Dalam hubungan internasional, konsep ini secara luas digunakan dan sering diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh negara di bidang ekonomi, militer, maupun budaya. Kepentingan nasional juga didefinisikan sebagai akumulasi dari rumusan pilihan rasional sesuai kebutuhan suatu negara (Saeri, Februari 2012). Terdapat tiga perspektif dalam konsep kepentingan nasional dimana salah satunya adalah perspektif yang memandang kepentingan nasional sebagai justifikasi terhadap kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara (Ashari, 2015).

Pada kasus keterlibatan Inggris dalam perang Suriah, Inggris memiliki tujuan dalam bidang militer yang ingin dicapai berupa kepentingan nasional untuk mendeteren kapabilitas senjata kimia Suriah. Tujuan tersebut tertuang didalam pernyataan Perdana Menteri Theresa May yang kemudian dijadikan justifikasi kebijakan sebuah serangan yang telah dilakukan pada bulan April 2018 bersama dengan Amerika dan Prancis yang ditargetkan untuk menyerang dan menghancurkan basis senjata kimia milik Suriah melalui serangan udara. Dalam pernyataannya, Theresa May mengatakan bahwa *“I have done so because I judge this action to be in Britain’s national interest. We cannot allow the use of*

chemical weapons to become normalised – within Syria, on the streets of the UK, or anywhere else in our world. We would have preferred an alternative path. But on this occasion there is none.” (Elgot, Middle East, 2018).

Pada kesempatan yang sama, May menambahkan “*I would like to make a Statement on the actions that we have taken, together with our American and French allies, to degrade the Syrian Regime’s chemical weapons capabilities - and to deter their future use.*” (May, 2018). Tindakan tersebut diambil sebagai pilihan rasional atas pemenuhan kebutuhan Inggris untuk selalu siap menjaga keamanan dan pertahanan dunia internasional sekaligus sebagai standar pemenuhan kepentingan nasional negaranya (Payne, 2018).

3. Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri

Merupakan analisis hubungan eksternal suatu negara beserta aktivitasnya dengan negara-bangsa di luar negeri. Pengambilan keputusan politik luar negeri termasuk didalamnya memuat tujuan, tindakan, strategi, metode, arahan, panduan, pemahaman, kesepakatan, yang dengannya pemerintah nasional menjalankan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional maupun aktor non-pemerintah (Ashari, 2015).

Pada saat membuat sebuah kebijakan luar negeri, negarawan atau para pembuat keputusan memiliki dasar pertimbangan yang berdasarkan pada beberapa model dalam pembuatan keputusan luar negeri (Mintz, 2017). Model birokrasi, model rasional, dan model *individual decision making*. Melalui model birokrasi, Inggris melakukan *voting* di parlemen untuk memutuskan kebijakan luar negeri untuk menyerang Suriah secara militer.

ALASAN INGGRIS MELIBATKAN DIRI SECARA MILITER DALAM PERANG SURIAH

Pada sebuah dokumen yang dipublikasikan oleh pemerintah Inggris pada tahun 2010, menyatakan bahwa tugas utama negara dan pemerintahan Inggris adalah akan dan tetap mengenai keamanan negara Inggris. Ditambahkannya bahwa saat ini Inggris berada pada kondisi yang lebih aman namun juga lebih rentan dibandingkan sebelumnya. Lebih aman karena Inggris tidak lagi berhadapan dengan ancaman konvensional berupa serangan dari kekuatan musuh *face-to-face* di masa lalu. Namun juga lebih rentan dari sebelumnya karena Inggris merupakan salah satu negara yang masyarakatnya paling terbuka di dalam dunia yang saling terhubung satu sama lain dibanding sebelumnya dimana hal ini dapat membuat Inggris menjadi sasaran mudah akan terjadinya serangan yang ditunjukkan terhadap Inggris (UK, 2010).

Karena hal tersebut, Inggris memiliki rangkaian strategi serta tujuan yang hendak dicapai guna mengamankan Inggris dari kemungkinan ancaman yang dapat terjadi di kemudian hari. Rangkaian strategi dan tujuan Inggris ini disebut kepentingan nasional yang termanifestasi dalam lingkup untuk menciptakan stabilitas kawasan yang lebih luas yakni dunia internasional, permasalahan migrasi, menciptakan kondisi yang aman, adil, dan tertib yang menjamin warga Inggris serta dunia untuk menjalani hidup bebas tanpa rasa takut, dan sikap kontra-terorisme berupa aksi deteren terhadap tindakan musuh (Development, 2018).

Kepentingan nasional Inggris dibawah Perdana Menteri David Cameron berfokus kepada melemahkan dan menghancurkan kekuatan ISIS dan kapabilitas senjata kimia Suriah, dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Theresa May Inggris memiliki kepentingan nasional yang hanya berfokus pada tindakan untuk mendeteren senjata kimia Suriah. Mengingat sudah banyak penggunaan senjata kimia yang dilakukan selama perang sejak tahun 2012. Penggunaan senjata kimia yang terbaru sebelum Inggris melancarkan serangan udara

terhadap Suriah adalah penggunaan senjata kimia di kota Dhouma di awal tahun 2018 yang menewaskan puluhan orang dan melukai ratusan lainnya. (Dettmer, 2018).

May mengatakan bahwa Inggris harus segera mengambil tindakan guna melindungi “keamanan operasional” negaranya. May menambahkan pula bahwa tindakan yang tepat yang harus diambil oleh Inggris bersama dengan sekutunya yaitu Amerika Serikat dan Prancis adalah dengan menyerang pusat persediaan senjata kimia Suriah. May tidak dapat membiarkan penggunaan senjata kimia menjadi sesuatu yang normal, dijalanan Inggris atau bahkan di dunia (Dettmer, 2018). Serangan ini dilakukan pada tanggal 14 April 2018 berupa serangan udara dan pengiriman misil dari kapal induk milik Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis. Pada pernyataan yang dikeluarkannya May mengatakan “*We have always been clear that the government has the right to act quickly in the national interest.*” (Sandford, 2018).

Tujuan dilakukannya serangan tersebut adalah untuk menurunkan kapasitas senjata kimia Suriah dan melindungi jatuhnya korban dari penduduk sipil yang lebih banyak. May tidak melakukan ini karena diminta oleh Presiden Trump, namun memang serangan itulah yang merupakan satu-satunya cara yang paling tepat yang dapat dilakukan melihat cara diplomatik sudah tidak memungkinkan dan tidak membuahkan hasil (Dettmer, 2018).

Keputusan luar negeri yang diambil melalui proses dengan menggunakan model-model pengambilan keputusan luar negeri. Model rasional, Perdana Menteri Inggris, baik David Cameron ataupun Theresa May selalu mempertimbangkan keuntungan serta kerugian dari pilihan tindakan yang akan diambil khususnya kebijakan luar negeri untuk melibatkan diri secara militer dalam perang Suriah atau tidak, serta apakah kebijakan tersebut dapat memenuhi kepentingan nasionalnya atau tidak. Keuntungannya adalah tidak digunakannya kembali senjata kimia Suriah dikemudian hari sedangkan kerugiannya adalah hal tersebut tidak memiliki jaminan pasti dan kemungkinan terburuk akan selalu dapat terjadi. (Greenfield, 2018). Sedangkan model *individual decision making* sebuah kebijakan luar

negeri diputuskan secara individu oleh pembuat keputusan yang memiliki kuasa seperti presiden atau perdana menteri tanpa melalui parlemen atau proses pemungutan suara. Inggris setelah dipimpin oleh Perdana Menteri Theresa May, dengan wewenang individu memutuskan untuk bergabung dengan sekutu Inggris yaitu Amerika Serikat dan Prancis untuk terlibat ke dalam serangan udara. Tindakan ini dilakukan oleh May dengan berpedoman pada hak prerogatif yang dimilikinya. Sehingga tanpa melalui Parlemen Inggris (dengan lobbying dan bargaining) ataupun proses pemungutan suara, May mengeluarkan kebijakan untuk menyerang senjata kimia Suriah di awal tahun 2018 (Sandford, 2018).

Proses pengambilan keputusan luar negeri diperoleh atau diambil oleh individual yang memiliki peran atau kekuasaan seperti seorang Presiden atau Perdana Menteri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, serangan udara oleh Inggris di awal 2018 diputuskan tanpa melalui Dewan Rakyat atau Parlemen Inggris. Theresa May sebagai Perdana Menteri mengatakan bahwa keputusan yang diambil adalah legal dan secara moral sudah benar. Keputusan ini tanpa melalui pemungutan suara atau persetujuan Parlemen Inggris seperti halnya yang dilakukan oleh David Cameron karena menurutnya, kondisi yang terjadi memiliki urgensi yang kuat yang membutuhkan keputusan cepat. Pemerintah pun memiliki wewenang untuk bertindak sendiri dan dapat mempertanggung jawabkannya kelak kepada parlemen setelah serangan dilancarkan (Sandford, 2018). Kemampuan Perdana Menteri Theresa May untuk mengambil tindakan berupa serangan militer adalah salah satu hak prerogatif kerajaan. Pemerintahan diijinkan untuk menggunakan kekuasaan tersebut atas nama kerajaan (Ben Wright, 2018).

Politik luar negeri suatu negara dapat mengalami perubahan. Terdapat empat bentuk perubahan yaitu *Adjustmet Changes*, *Pogram Chages*, *Problem/Goal Changes*, dan *International Changes*. Pada kasus keterlibatan Inggris dalam perang Suriah, pengambilan keputusan luar negeri yang diambil oleh Theresa May mengalami perubahan pada level

paling ekstrem yaitu *International Orientation Changes* dimana tujuan atau target dan cara yang digunakan berubah dari kebijakan sebelumnya sehingga menghasilkan kebijakan yang sepenuhnya baru. Sebelumnya, Inggris dibawah kepemimpinan Perdana Menteri David Cameron tidak terlibat secara militer ke dalam perang Suriah. Namun, dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Theresa May Inggris mengambil tindakan yang sama sekali berbeda dengan melakukan intervensi pada perang Suriah dengan menggunakan kekuatan militer (serangan udara pada basis senjata kimia perang Suriah) yang memiliki tujuan untuk mencegah dampak yang lebih besar dari penggunaan senjata kimia di Suriah.

Menurut *English School*, masyarakat internasional melihat Inggris sebagai negara yang besar dan kuat. Hal ini juga merupakan nilai dasar dari mazhab ini yang menyebut bahwa tatanan masyarakat internasional adalah masyarakat anarki yang mana poin utamanya adalah peningkatan serta pemeliharaan nilai fundamental masyarakat internasional yaitu ketertiban dan keadilan internasional. Pihak yang bertanggung jawab atas nilai fundamental tersebut adalah negara yang besar dan kuat. Negara yang besar dan kuat ini berhak untuk mengintervensi suatu negara lain atas doktrin untuk melindungi R2P (*Responsible to Protect*) dimana syaratnya, warga di negara tersebut mengalami penderitaan karena perang atau konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintahan di negaranya sendiri (Jackson & Sorensen, 2013).

Faktanya, Inggris adalah pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, serta anggota organisasi pertahanan NATO (North Atlantic Treaty Organization). Karenanya, Inggris dianggap sebagai negara yang penting, besar, dan kuat di dunia internasional dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ke-6 di seluruh dunia serta dengan kekuatan militer terkuat ke-6 di dunia (Editorial, 2010).

Dengan semua kapasitas yang dimiliki oleh Inggris tersebut, sebagai dasar hukum dari intervensi militer yang dilakukan Inggris terhadap Suriah adalah sebagai bentuk dari

intervensi kemanusiaan untuk mencegah terjadinya kekejaman seta penderitaan pada penduduk sipil Suriah yang mungkin akan lebih parah. Selama perang 8 tahun Suriah, hampir 500.000 orang telah tewas, jutaan orang menjadi pengungsi dan sisanya berada dalam keadaan terjebak dalam perang (Commons, 2017-2019).

DAFTAR PUSTAKA

Aljazeera. (2018, April 14). *Middle East*. Retrieved from Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2016/05/syria-civil-war-explained-160505084119966.html>

Ashari, K. (2015). Kamus Hubungan Internasional. In K. Ashari, *Kamus Hubungan Internasional* (pp. 374-375). Bandung: Nuansa Cendekia.

Ben Wright. (2018, April 11). *UK*. Retrieved from BBC News Web site: <https://www.bbc.com>

Blinx, H. (2018). Arms Control Today. *ACA's Journal* , 1-13.

Blix, H. (2018, Agustus 17). *Fact Sheets & Briefs*. Retrieved from Arms Control Association Web Site: <https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Syrian-Chemical-Weapons-Activity>

Commons, H. o. (2017-2019). *Global Britain: The Responsibility to Protect and Humanitarian Intervention*. London: Authority of the House of Commons.

Dettmer, J. (2018, April 16). *Europe*. Retrieved from VOA News Web site: <https://www.voanews.com/a/britain-prime-minister-says-airstrikes-on-syria-in-british-national-intererst/4350693.html>

Development, D. f. (2018). *Worldwide*. Retrieved from Government of UK Web site: <https://www.gov.uk/world/organisations/dfid-syria-crisis-response>

Editorial. (2010, Januari 25). *Opinion*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com>

Elgot, J. (2018, April 18). *Middle East*. Retrieved from The Guardian Web Site: <https://www.theguardian.com/world/2018/apr/14/theresa-may-britain-air-strikes-syria-chemical-weapons-raf>

Greenfield, G. R. (2018, April 14). *Europe*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com>

Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). Pengantar Studi Hubungan Internasional . In R. Jackson, & G. Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (pp. 232-259). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

May, T. (2018, April 18). Statement on Syria. London, United Kingdom.

Mintz, D. B. (2017, December). *Foreign Policy*. Retrieved from Oxford Research Encyclopedias web site: www.oxfordre.com

Office, F. C. (2018). *World* . Retrieved from Government UK Web site: <https://www.gov.uk/world/syria/news>

Payne, A. (2018, April 13). Retrieved from Business Insider:
<https://www.businessinsider.sg>

Pujimori, A. N. (2015). THE USE OF CHEMICAL WEAPONS FROM INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE : A CASE STUDY OF SYRIA. *Repository UMY* , 1-3.

Saeri, M. (Februari 2012). Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik. *Jurnal Transnasional* , 7-12.

Sandford, A. (2018, April 16). *World*. Retrieved from Euronews Web site:
<https://www.euronews.com/2018/04/16/watch-live-theresa-may-faces-parliament-over-syria-strikes>

Staff, N. (2011, December 17). *All Things Considered*. Retrieved from NPR Web Site: <https://www.npr.org/2011/12/17/143897126/the-arab-spring-a-year-of-revolution>

UK, G. o. (2010, October). *The National Security Strategy*. Retrieved from Government UK Web site:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61936/national-security-strategy.pdf

Waring, O. (2018, April 12). *News*. Retrieved from Metro : <https://metro.co.uk>